



Equality Indonesia, pt
Services in Inspection, Testing & Certification



**PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Nomor : 840/EQ.SHPK/XI/2018**

LVLK PT Equality Indonesia menyampaikan hasil VLK terhadap :

Nama Auditee : KELOMPOK TANI MUSI MAJU JAYA
Alamat : Jl. H. Syamsudin Uban No.6 Rt.004 Kelurahan
Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan- Kota Jambi
No. Izin : Akte Pendirian No.41 Tanggal 26 Juni 2014 Notaris
Indra Kurniawan Harahap, S.H
Jenis Usaha : Hutan Hak
Luas : ± 1.746 Ha, Jumlah 95 Anggota
Tanggal Pelaksanaan : **22 s.d 26 Oktober 2018**
Hasil Penilaian : Nilai Akhir VLK dinyatakan Memenuhi, sehingga
Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) yang diberikan
kepada Kelompok Tani Musi Maju Jaya Provinsi
Sumatera Selatan dapat dipertahankan.

Apabila terdapat keluhan terkait hasil keputusan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja
Kabupaten Bogor 16710
Telp. : (0251) 7550722
Fax. : (0251) 7550724
Email : eg@equalityindonesia.com
Website : www.equalityindonesia.com

Bogor, 16 November 2018
PT. EQUALITY INDONESIA

Hari Seno Aji, S. Hut.
Manager Subdivisi Sertifikasi LK

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LV-LK

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA
- b. Nomor Akreditasi : LVLK- 006-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Bogor
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722
Nomor Fax : 0251-7550724
E-mail : equalitycert@gmail.com
- e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
- f. Standar : Perdirjen PHPL Nomor : P.14/PHPL/Set/4/2016 jo
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/ 2016
- g. Tim Audit : Ir. Irin Wedalia
- h. Tim Pengambil
Keputusan : Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)
Amin Muchakim, S.Hut (Anggota PK)

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Auditee : **KELOMPOK TANI MUSI MAJU JAYA**
- b. Akte Notaris : Indra Kurniawan Harahap, SH.
- c. Nomor : No.41 Tanggal 26 Juni 2014
- d. Luas dan Lokasi : ± 1.746 Ha Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan
- e. Jumlah Anggota : 95 Anggota
- f. Alamat : Jl. H. Syamsudin Uban No.6 Rt.004 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan- Kota Jambi.
- g. Pengurus :
 - Ketua : Muhammad Royyen Sa'ari
 - 1. Wakil Ketua I : Agus Rudianto
 - 2. Wakil Ketua II : Sujimin
 - 3. Wakil Ketua III : Lakoni Solichin
 - 4. Sekretaris : Nafatil Gusrianto
 - 5. Bendahara : Donna Melvi Sinaga

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	-	-
Pertemuan Pembukaan	22 Oktober 2018 Ruang Rapat Kantor PT SHP di Jambi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertemuan dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor PT Sumber Hijau Permai di Jambi yang merupakan Mitra dari Kelompok Tani Musi Maju Jaya (KT MMJ). 2. Perkenalan Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, serta mengkonfirmasi kepada KT MMJ tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan 3. Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	22-25 Oktober 2018 Ruang Rapat Kantor PT SHP di Jambi dan lokasi lahan Hutan Hak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan Verifikasi adalah melihat konsistensi penerapan prinsip-prinsip pada legalitas kayu. 2. Verifikasi kegiatan fokus untuk periode bulan Oktober 2016 sd September 2018. 3. Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen KT MMJ dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.3 dan 3.3 Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/ PPHH/HPL.3/8/ 2016
Pertemuan Penutupan	26 Oktober 2018 Ruang Rapat Kantor PT SHP di Jambi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pengurus KT MMJ atas bantuan dan kerjasamanya selama verifikasi. 2. Menyampaikan Daftar Periksa 3. Memberitahukan catatan korektif. 4. Membacakan atau memperlihatkan laporan hasil penilaian. 5. Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP dilampiri dengan notulen dan daftar hadir.
Pengambilan Keputusan	09 November 2018	Rapat pengambil keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia dan mengambil keputusan apakah KT MMJ dapat mempertahankan S-LK yang telah diberikan atau tidak

(4) Resume Hasil Penilaian :

(a) Lampiran 2.3 Perdirjen PHPL Nomor : P.14/PHPL/Set/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/ 2016

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P.1. Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya		
K1.1 Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal, kayu dan perdagangannya.		
1.1.1. Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya.		
a. Dokumen kepemilikan/penguasaan lahan yang sah(alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia dokumen kepemilikan lahan berupa Surat Pengakuan Hak Atas Tanah (SPHAT) dan Surat Keterangan Tanah Belukar (SKT), yang diterbitkan oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat.. ▪ Tersedia surat BPKH Wilayah II Palembang Nomor: S.563/BPKH II.2/2016 Tanggal 09 November 2016 tentang Hasil Telaahan Areal Kelompok Tani Musi Maju Jaya yang menyatakan bahwa lahan Kelompok Tani Musi Maju Jaya berada pada Areal Penggunaan Lain (APL).
b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan.	NOT APPLICABLE	Verifier ini masuk dalam kategori Not Applicable atau diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan karena Auditee adalah merupakan kelompok hutan hak yang tergabung dalam sebuah kelompok tani dan bukan pemegang izin HGU.
c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya dilapangan.	MEMENUHI	Tersedia sketsa lokasi lahan anggota kelompok tani dan terdapat tanda-tanda yang jelas dilapangan berupa batas alam maupun batas buatan.
1.1.2. Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah		
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	MEMENUHI	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah (Nota Angkutan dan Nota Angkutan Lanjutan) diterbitkan oleh yang berwenang.
1.1.3. Unit Kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sector kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak atau penguasaan.		
Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.	NOT APPLICABLE	Verifier ini masuk dalam kategori Not Applicable atau diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan karena areal Auditee berada pada Areal Penggunaan Lain (APL) yang telah ditanami dengan jenis tanaman akasia. Selain itu Auditee tidak melakukan penebangan hutan alam sehingga tidak mempunyai kewajiban melakukan pembayaran PSDH/DR.
K1.2 Unit usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.2.1 Akte atau dokumen pembentukan kelompok		
Akte atau dokumen pembentukan kelompok	MEMENUHI	Auditee telah memiliki Akte Notaris Pendirian Kelompok Tani No.41 Tanggal 26 Juni 2014, oleh Notaris Indra

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Kurniawan Harahap, SH, dengan nama Kelompok Tani Musi Maju Jaya.
Internal audit anggota kelompok	MEMENUHI	Tersedia dokumen hasil internal audit anggota kelompok sebesar 100% anggotanya.
K.1.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 1.3.1 Implementasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	MEMENUHI	Dokumen pengangkutan kayu menggunakan Tanda V-Legal.
P2. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan		
K.2.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegang HGU		
2.1.1 Prosedur dan Implementasi K3		
a. Pedoman/prosedur K3 dan personel untuk implementasi K3.	NOT APPLICABLE	Verifier ini masuk dalam kategori Not Applicable atau diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan karena Auditee bukan pemegang izin HGU sehingga tidak diwajibkan melakukan penyusunan pedoman/prosedur K3
b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri)	NOT APPLICABLE	Verifier ini masuk dalam kategori Not Applicable atau diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan karena Auditee bukan pemegang izin HGU, sehingga tidak wajib memiliki peralatan K3
c. Catatan kecelakaan kerja	NOT APPLICABLE	Verifier ini masuk dalam kategori Not Applicable atau diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan karena Auditee bukan pemegang izin HGU, sehingga tidak wajib memiliki dokumen catatan kecelakaan kerja
K.2.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
2.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU		
Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	NOT APPLICABLE	Verifier ini masuk dalam kategori Not Applicable atau diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan karena Auditee bukan pemegang izin HGU, sehingga tidak wajib memiliki Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
2.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) utk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	NOT APPLICABLE	Verifier ini masuk dalam kategori Not Applicable atau diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan karena anggota Kelompok Tani bukan pemegang Hak Usaha Guna (HGU).
2.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	MEMENUHI	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.
P3. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
K.3.1. HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (jika dipersyaratkan oleh ketentuan yang berlaku).		
3.1.1 HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya.	MEMENUHI	Tersedia Dokumen lingkungan berupa Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok.
3.1.2 HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan		
a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan.	MEMENUHI	Tersedia dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	MEMENUHI	Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana.

(b) Lampiran 3.3 Perdirjen PHPL Nomor : P.14/PHPL/Set/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/ 2016

NO	JENIS DOKUMEN	PEMENUHAN DOKUMEN	KETERANGAN
A. Dokumen Kelembagaan			
1	Akte Notaris	ada	Auditee telah memiliki Akte Notaris Pendirian Kelompok Tani No.41 Tanggal 26 Juni 2014, oleh Notaris Indra Kurniawan Harahap, SH, dengan nama Kelompok Tani Musi Maju Jaya.
2	Struktur Organisasi dan Kepengurusan	ada	Akte Pendirian Kelompok Tani Musi Maju Jaya Pasal 21 menyebutkan badan pengurus terdiri dari: Ketua : Muhammad Royyen Sa'ari Wakil Ketua : 1. Agus Rudianto. 2. Sujimin. 3. Lakoni Solichin. Sekretaris : Nafatil Gusrianto Bendahara : Donna Melvi sinaga Sesuai dengan pasal tersebut pengurus diatas mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam menjalankan organisasi.
3	Komitmen tertulis untuk memenuhi prinsip dan kriteria verifikasi LK	ada	Telah tercantum dalam Akta Pendirian, pada pasal 5 huruf e.
4	Aturan untuk mengendalikan anggotanya :	ada	Aturan untuk mengendalikan anggota telah dijabarkan dalam pasal 7 s.d pasal 10 dari akta notaris yang telah dibuat.

NO	JENIS DOKUMEN	PEMENUHAN DOKUMEN	KETERANGAN
	a) Hak dan kewajiban tanggung jawab anggota	ada	Hak dan kewajiban anggota diatur dalam pasal 8 dan 9.
	b) Persyaratan menjadi anggota	ada	Persyaratan menjadi anggota kelompok tani MMJ diatur dalam pasal 6. Seluruh warga Negara RI yang memiliki lahan untuk pembangunan HTI baik perorangan atau kelompok di sekitar wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.
	c) Aturan pencabutan/pembekuan sebagai anggota	ada	Keanggotaan berakhir diatur dalam Pasal 10
	d) Sistem pengawasan internal dan kontrol terhadap anggota.	ada	Sebagai pengawasan internal telah dibuat surat perjanjian kerjasama Pembangunan Hutan Rakyat Pola Kemitraan (HRPK) dengan PT Sumber Hijau Permai (HTI) dan Kelompok Tani Musi Maju Jaya, yang merupakan gabungan Kelompok Tani Jaya Makmur, Kepayang, Karang Agung dan Lakoni Solichin. Yang mengatur tentang hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.
B.	Dokumen Teknis		
1	Nama dan informasi setiap anggota,	ada	Informasi yang dicatat dalam daftar anggota meliputi: Nama anggota, Alamat, dan Luas Pemilikan Lahan.
2	Rekaman pelatihan	ada	Laporan kegiatan pelatihan KMPA tentang pengenalan alat pemadam kebakaran dan pengoperasiannya serta simulasi yang telah dilaksanakan oleh tim RPK dan Kelompok Masyarakat Peduli Api (KMPA), yang diadakan oleh PT SHP pada tanggal 18 November 2017.
3	Peta kawasan hutan	ada	- Peta Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Selatan yang dimiliki HTI PT Sumber Hijau Permai (PT SHP). - Peta Hutan Rakyat masing-masing kelompok yang tergabung dalam KT Musi Maju Jaya.
4	Bukti kepemilikan lahan	ada	Terdapat bukti pemilikan lahan berupa surat keterangan dari Kepala Desa yang diketahui oleh Camat berupa Surat Pengakuan Hak Atas Tanah dan Surat Keterangan Tanah.
5	Dokumen terkait dengan pelaksanaan manajemen hutan	ada	Surat Perjanjian Kerjasama Pembangunan Hutan Rakyat Pola Kemitraan (HRPK) antara KT MMJ dengan HTI PT Sumber Hijau Permai (PT SHP).
6	Dokumen Internal Audit	ada	Dokumen Laporan Audit Internal tahun 2018 terhadap seluruh anggota kelompok (100%)